

## Jobfair 42

**UKSW**

BALAIRUNG UKSW 16 & 17 FEBRUARI 2023  
08.00 - 16.00 WIB

Sponsorship :

**GRATIS**

TERBUKA UNTUK UMUM  
(SMAK/SMA, D3 - S2)

LANGSUNG TES

DIREKTORAT  
KEALUMNIAN DAN KARIER UKSW

[jobfair.uksw.edu](http://jobfair.uksw.edu)

## Santri Dilantik Jadi Panwasdes

**MAGELANG (KR)** - Panwasdes Bandongan melantik seorang santri, Zaini Maskuri sebagai panwasdes bersama belasan panwasdes lain untuk Pemilu 2024 di kecamatan tersebut, Senin (6/2). Ketua Panwasdes Bandongan Arrosyid MSc mengatakan Zaini Maskuri bertugas sebagai Panwasdes Desa Sukodadi. Ia merupakan santri di Pondok Pesantren Ma'ahidul Irfan Soropaten dan dalam pendaftaran menggunakan ijazah kejar Paket C. "Kami memilih yang bersangkutan karena memiliki pengetahuan yang luas dibidang kepemiluan dibanding pendaftar lain untuk Desa Sukodadi," kata Arrosyid, usai pelantikan Senin (6/2). Anggota Panwasdes Bandongan Farid Gunarto mengatakan dilantikannya Zaini Maskuri sebagai bukti bahwa lulusan kejar Paket C dan seorang santri pondok pesantren mampu bersaing dengan lulusan SMA/SMK bahkan perguruan tinggi sebagai penyelenggara kepemiluan. "Pondok pesantren Ma'ahidul Irfan juga mendukung, santrinya untuk menjadi Panwasdes," katanya. (Osy)-f

## PKS Salatiga Sosialisasikan Anies Baswedan

**SALATIGA (KR)** - Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Salatiga melakukan langkah sosialisasi kepada masyarakat untuk memenangkan Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sosialisasi ini meliputi program yang diangkat Anies Baswedan maju Pilpres nanti.

Selain itu, DPD PKS Salatiga juga membentuk tim pemenangan hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dan berkolaborasi dengan relawan untuk mendulang suara pada Pilpres di Salatiga. "Kami bertekad memenangkan Anies Baswedan di Salatiga. Kami menyiapkan tim pemenangan hingga tingkat RT," kata Ketua DPD PKS Salatiga Latif Nahari, Selasa (7/2). Ia mengatakan, meski belum mengetahui figur cawapres yang akan mendampingi Anies, namun PKS Salatiga tetap bertekad berjuang untuk kemenangan mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

"Soal pendamping (cawapres) diserahkan ke Pak Anies Baswedan sesuai keputusan pusat. Kami ikut keputusan partai di DPP. Yang pasti, kami sudah bulat dan tekad kuat mendukung Pak Anies," ujar Latif. Sosok Anies Baswedan, menurutnya sudah dikenal oleh masyarakat. Bahkan sejauh ini, sudah sejumlah relawan yang siap bergabung dengan DPD PKS Salatiga untuk berjuang memenangkan Anies Baswedan. (Sus)-f

## Sosialisasi Akreditasi Internasional

**SEMARANG (KR)** - Politeknik Negeri Semarang (Polines) menggelar acara Focuss group Discussion (FGD) dan sosialisasi Akreditasi internasional untuk para Kaprodi dan ketua jurusan di lingkungan Polines. Jumat (3/2). Kegiatan FGD dilakukan menyusul diperolehnya Akreditasi Internasional dari HEEACT (Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan) terhadap Program Studi Komputer Akutansi (Kompak) Sarjana Terapan Jurusan Akutansi Polines.

Direktur Polines Prof Dr Totok Prasetyo BEng (Hons) MT IPU ASEAN Eng ACPE dan Ketua jurusan Akutansi Siti Arbainah SE MM menyampaikan rasa syukur atas capaian bagus berupa akreditasi internasional untuk waktu 6 tahun. Diraihnya akreditasi internasional ini diharapkan akan memicu serta memacu prodi lain di jurusan akutansi maupun prodi dan jurusan lain di Polines. Pada kesempatan itu, acara yang dihadiri pula para wakil direktur ini ditandai dengan pemotongan tumpeng, penyerahan sertifikat HEAACT dari Direktur ke Kajur Akutansi dan dilanjutkan ke Kaprodi Afiat Sadida SKom MM dan ketua satgas akreditasi prodi Kompak Dr Ardiansyah. (Sgi)-f

## Marak Informasi Penculikan, Perlu Dicek Kebenarannya

**MAGELANG (KR)** - Akhir-akhir ini marak informasi atau isu terjadinya aksi penculikan anak. Ada informasi yang menyebutkan ada anak didatangi kendaraan saat pulang sekolah. Namun setelah dilakukan pengecekan dan yang bersangkutan ditanya lagi, ternyata tidak ditemukan. Hendaknya informasi tersebut dicek kebenarannya. Pengecekan harus benar-benar dilakukan sampai pada tingkat validitas kejadian.

Demikian dikatakan Kapolresta Magelang Kombes Pol Ruruh Wicaksono SH SIK MH kepada wartawan



KR-Thoha

Kapolresta Magelang saat memberikan keterangan kepada wartawan.

## ASN Klaten Terancam Tak Dapat Beras Srinuk

**KLATEN (KR)** - Bupati Klaten, Sri Mulyani mengaku mendapat keluhan warga terkait kenaikan harga beras. Bahkan kenaikan harga itu juga berdampak pada penyediaan beras Rojolele Srinuk yang dikonsumsi ASN Klaten. Bupati mengatakan, kebutuhan beras Rojolele Srinuk untuk ASN setiap bulan hampir 100 ton atau sebanyak 10 kg/ASN, namun pada bulan Februari hanya mendapat 5 kg/ASN.

Sedangkan, untuk bulan Maret sudah tidak bisa lagi menyediakan beras Rojolele Srinuk untuk ASN. Hal ini dikarenakan, harga pembelian dari ASN hanya Rp 13.000/kg, sedangkan harga pasar sekarang sudah mencapai Rp 15.000/kg.

"Sudah kesulitan untuk

menyediakan bagi ASN. Tentunya dengan kenaikan harga ini ASN harus mengikuti harga pasar, tidak bisa membeli dengan harga yang kemarin. Kalau tetap harga lama, nanti rugi BUMD kita, Aneka Usaha," kata Sri Mulyani, Rabu (8/2). Menurut Bupati, sebenarnya petani Klaten sedang panen, tetapi ada daerah-daerah yang lain di Indonesia yang tidak memiliki sumber pertanian. Hal ini yang membuat beras menjadi langka atau mahal, sehingga pemerintah ambil kebijakan impor beras.

"Dengan harga tinggi naik sekitar Rp 1.000 hingga Rp 1.200/kg sebenarnya kalau saya sih senang juga, tetapi naiknya jangan terlalu lama. Adanya kenaikan harga ini yang diuntungkan petani.

Selama ini biasanya kalau panen harga anjlog, sekarang pas panen harga tinggi. Saya senang saya dukung para petani biar ada peningkatan ekonomi, tapi kan kita melihatnya tidak hanya di Klaten, melainkan skala nasional," jelas Sri Mulyani.

Saat ini distributor beras Rojolele Srinuk sudah kewalahan menerima pembelian dari luar. Dalam situasi sekarang, beras Rojolele Klaten dibeli dengan harga Rp 14.000 sampai Rp 15.000/kg.

Untuk mengetahui perkembangan harga komoditas pangan di Klaten, Bupati beserta jajaran sebelumnya telah melakukan sidak di pasar tradisional, yakni Pasar Srago dan Pasar Delanggu. Bupati menilai kenaikan

harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Klaten masih dalam kondisi wajar.

Meski demikian, dirinya akan melakukan operasi pasar, jika harga kebutuhan pokok naik secara signifikan. Pedagang sembako di Pasar Srago, Sri Uyah, menga-

takan harga beras naik sekitar Rp 2000/kg.

"Harga beras naik Rp 2000, tetapi untuk beras Rojolele Srinuk sudah langka di pasaran. Minyak bersubsidi, Minyak Kita, stok sudah menipis, tinggal yang kemasan saja," kata Sri Uyah. (Sit)-f



KR-Sri Watsiti

Bupati Klaten cek perkembangan harga di pasar tradisional.

## Ratusan Panwaslu Desa Siap Kawal Hak Pilih

**MAGELANG (KR)** - Selesai dilantik, sebanyak 372 Panwaslu Kelurahan atau Desa (PKD) se-Kabupaten Magelang langsung diterjunkan untuk pengawasan tahapan pemilu 2024. Panwasdes akan mengawal hak pilih masyarakat se-Kabupaten Magelang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Shaleh menyampaikan sebanyak 372 Pengawas Kelurahan atau Desa (PKD) untuk Pemilu 2024 dilantik pada tanggal 5 dan 6 Februari 2023 sesuai jadwal kecamatan masing-masing.

Dalam pelantikan ini ada pengarah dari Ketua Bawaslu Provinsi Jateng Muhammad Amin dan pimpinan Bawaslu Kabupaten Magelang. Panwasdes terlanjak selanjutnya mengikuti Bintek dari camat, PPK dan komisioner Panwasdes.

"Setelah pelantikan ini, PKD kami arahkan untuk segera silaturahmi dan berkoordinasi dengan para kades, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Istilahnya kulo nuwun, memperkenalkan diri dan membangun komunikasi yang baik," kata Habib, Rabu (8/2).

Habib meminta para PKD untuk mulai memetakan kerawanan di lingkungannya. Segala hal terkait kegiatan tahapan Pemilu 2024 di desanya PKD harus mengikuti perkembangan dan dinamikanya.

Hal ini penting agar ketika terjadi potensi pelanggaran PKD bisa melakukan upaya pencegahan pelanggaran.

"Kami ingatkan bahwa menjadi pengawas pemilu bukan sekedar pekerjaan sambil lalu, bukan pula pekerjaan sampingan apalagi pekerjaan berkala. Kala kala datang, kala kala menghilang. Kadang kala mengawasi kadang lupa," ujar Habib.

Ia menegaskan bahwa seorang pengawas pemilu dituntut untuk bekerja penuh waktu, penuh tanggung jawab, jeli, teliti, jujur, adil, dan independen serta menjaga netralitas dan membangun integritas, baik dalam ucapan maupun tindakan.

Disebutkan bahwa hasil kerja pengawas pemilu yang akan memastikan apakah pemilu su-

dah memenuhi prinsip LUBER JURDIL atau belum. "Begitu besar tanggung jawab pengawas pemilu sehingga semua penyelenggara pemilu wajib bekerja penuh integritas, dedikasi dan tentu saja totalitas," tegas Habib.

Ditambahkan Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Magelang, Sumarni Aini CH jika Panwaslu Kelurahan/Desa akan dilibatkan dalam pengawasan verifikasi faktual (verfak) calon DPD serta pemutakhiran data pemilih (mutarlih) Pemilu 2024.

Untuk itu, semua jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Magelang wajib mencegah potensi-potensi pelanggaran, melaporkan dugaan pelanggaran dan melakukan penindakan pelanggaran sesuai kewenangan. (Bag)-f

## Agar Wajib Pajak Tertib PBB Tidak Dinaikkan

**KARANGANYAR (KR)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar memastikan besaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2023 masih memakai perhitungan lama sejak 2008 silam. Perhitungannya tidak akan berubah meski nilai jual obyek pajak (NJOP) terus mengalami peningkatan. "PBB naik itu sama saja memberatkan rakyat. Pendapatan pajak bisa didapatkan dari sektor

lain," kata Bupati Karanganyar Juliyatmono kepada wartawan usai penyerahan simbolis SPPT PBB P2 tahun pajak 2023 di Pendapa Raden Mas Said Karanganyar, Selasa (7/2).

Yuliyatmono mengawali pembayaran SPPT PBB P2 tahun 2023 untuk rumahnya di Dusun Pokoh Desa Ngijo Tasikmadu senilai Rp 96 ribu. Tagihan itu selalu sama setiap tahun sejak 15 tahun ter-

akhir atau pada tahun 2008. Luasan rumahnya 300 meter persegi dengan NJOP Rp 118 juta. Di periode ini, Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar mencetak 464.970 lembar SPPT PBB atau bertambah 8.218 lembar dibandingkan tahun lalu sebesar 456.752 lembar. Dari ratusan lembar SPPT itu ditarget dilunasi Rp 31,810 miliar. Jumlah SPPT PBB yang dicetak mengalami penam-

bahan secara signifikan dari tahun ke tahun.

"Sektor lain masih banyak penumbang PAD. Seperti BPH-TB. Pajak jual beli aset itu di atas Rp 80 miliar. Belum lagi pendapatan dari cukai rokok Rp16 miliar. Jadi, tidak perlu menaikkan PBB. Biar wajib pajak juga taat membayarnya," katanya. Berdasarkan catatan nilai investasi di 2022, diperoleh angka Rp4 triliun. (Lim)-f



## Jateng Harus Segera Bangun IPAL Regional

**PENCEMARAN** limbah rumah tangga dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga dibutuhkan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Komisi D DPRD Jawa Tengah menilai pengelolaan IPAL dapat dilakukan secara regional antar kabupaten/kota. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso kepada wartawan di Semarang Rabu (8/2), usai melakukan studi banding soal IPAL di Sewon Kabupaten Bantul Provinsi DI. Yogyakarta, Kamis (2/2). IPAL di Sewon Bantul itu dikelola oleh Pemkot Yogyakarta, Pemkab Sleman, dan Pemkab Bantul.

Dalam pengelolaannya, ada teknik yang memisahkan antara greenwater dan blackwater (limbah/tinja rumah tangga). Komisi D DPRD Jawa Tengah menilai IPAL tersebut sangat ideal bagi masyarakat perkotaan, yang tidak perlu lagi membuat resapan untuk limbah rumah tangganya.

Dari studi banding itu, Komisi D melihat sistem pengoperasiannya. Meski IPAL Sewon masih dibawah Balai Pialam (Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum) Dinas PUPESDM (Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM) Provinsi



KR-Budiono

Hadi Santoso

DIY, juga terdapat forum komunikasi tiga kabupaten/kota dan pemprov. Sistem pengelolaan tersebut yang menjadi fokus Komisi D.

Untuk sistem pembayarannya, masyarakat yang menggunakan jasa IPAL Sewon dikenai retribusi secara bulanan.

Masyarakat mendapatkan sambungan dan saluran menuju IPAL Sewon. Jadi, Pemprov DIY tidak dapat keuntungan langsung dari masyarakat, melainkan

pemkab/ pemkot yang menarik retribusi ke masyarakat. Pemprov DIY mendapat imbal jasa pengelolaan dari pemkot/ pemkab. Dari studi banding ke Bantul itu, Komisi D berharap Pemprov Jateng bisa segera membangun IPAL regional. Diketahui, pada 2023 ini Pemprov Jateng berencana membangun IPAL regional di Banyumas dan Purbalingga. Selain itu, juga melakukan klastering di beberapa daerah dengan rencana pembangunannya di Surakarta. (\*)-f

(Disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso kepada wartawan KR Biro Semarang Budiono Isman, Anf)